



Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Botugolu Kabupaten Buol

Eko Hardianto¹, Sukarman Kamuli², Lucyane Djaafar³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hardianto.sthb@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Farmer group empowerment is a tactical effort to improve rural community welfare; however, in practice, it still faces various institutional and social limitations. This study aims to analyze the role of the village government and identify constraints in empowering farmer groups in Botugolu Village, Buol Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive approach using interviews, observations, and documentation techniques. The findings reveal that the village government has performed its roles as a facilitator through the provision of agricultural inputs and budget allocation, as a dynamizer through socialization and technical assistance, and as a regulator through village deliberation mechanisms and policy implementation. However, these roles have not been fully effective due to the lack of comprehensive needs-based planning, low farmer participation, and limited understanding of policies. In addition, internal constraints such as limited budget, infrastructure, institutional capacity, and coordination, as well as external constraints including low literacy, economic limitations, and administrative capacity of farmers, significantly affect the success of empowerment programs. This study concludes that farmer group empowerment has not yet achieved substantive effectiveness, thus requiring a more integrative, participatory, and sustainable approach to enhance farmers' independence

Keywords: Empowerment, Village Government Role, Farmer Groups, Challenges Faced

ABSTRAK

Pemberdayaan kelompok tani merupakan upaya taktis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa serta mengidentifikasi kendala dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu, Kabupaten Buol. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana produksi dan anggaran, sebagai dinamisator melalui sosialisasi dan pendampingan, serta sebagai regulator melalui mekanisme musyawarah desa dan implementasi kebijakan. Namun, efektivitas peran tersebut masih terbatas karena belum berbasis kebutuhan yang utuh, rendahnya partisipasi petani, serta lemahnya pemahaman terhadap kebijakan. Selain itu, kendala internal seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, kapasitas aparatur, dan koordinasi, serta kendala eksternal seperti rendahnya literasi, keterbatasan ekonomi, dan kemampuan administratif petani turut memengaruhi keberhasilan pemberdayaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok tani belum berjalan optimal secara substantif sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian petani.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Peran Pemerintah Desa, Kelompok Petani, Kendala yang dihadapi*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan pada hakikatnya berorientasi pada upaya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk menentukan pilihan serta mengelola sumber daya yang ada (Kamuli et al., 2021). Perspektif tersebut melahirkan berbagai pendekatan dalam memahami pemberdayaan, termasuk pendekatan kelembagaan yang menekankan peran aktor formal seperti pemerintah desa (Radjak et al., 2024). Pendekatan ini seringkali mengklaim objektivitas, namun dalam praktiknya dapat terjebak pada bias struktural yang lebih menonjolkan aspek administratif dibandingkan substansi pemberdayaan. Dalam dimensi vertikal, pendekatan kelembagaan cenderung mengabaikan kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat desa, sedangkan dalam dimensi horizontal sering mengabaikan relasi setara antara pemerintah desa, kelompok tani, dan aktor pendukung lainnya (Suprobowati & Miskan, 2025). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat seharusnya dipahami secara utuh dengan mempertimbangkan interaksi antara struktur, aktor, dan konteks sosial yang melingkupinya.

Keterbatasan pendekatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat tercermin dalam praktik pembangunan pertanian di pedesaan. Kompleksitas pemberdayaan yang tidak dapat dipahami secara tunggal menuntut adanya kajian kritis terhadap peran pemerintah desa sebagai aktor utama di tingkat lokal. Pemberdayaan kelompok tani yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam praktiknya sering belum berjalan optimal (Jahra et al., 2025). Kelompok tani yang diharapkan menjadi wadah pembelajaran, kerja sama, dan penguatan kapasitas petani justru belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya akses terhadap informasi, rendahnya kapasitas teknis, serta lemahnya kelembagaan kelompok tani dalam mengelola usaha pertanian (Farid et al., 2025; Ginting & R, 2025). Pemberdayaan yang idealnya berorientasi pada peningkatan kemandirian seringkali berubah menjadi program formalitas yang kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Ketidakefektifan pemberdayaan kelompok tani tidak terlepas dari lemahnya peran pemerintah desa sebagai regulator. Pemerintah desa yang seharusnya mampu menyediakan regulasi dan memastikan tersosialisasinya kebijakan kepada masyarakat masih belum menjalankan fungsi tersebut secara maksimal (Pangaribuan & Kurniaty, 2025). Lebih lanjut rendahnya intensitas sosialisasi kebijakan pertanian menyebabkan petani kurang memahami aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah (Pangaribuan & Kurniaty, 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* berupa tujuan kebijakan pemberdayaan dan *das sein* berupa realitas implementasi di lapangan. Pemahaman terhadap regulasi merupakan aspek dasar dalam

membangun kapasitas adaptif petani terhadap dinamika pembangunan pertanian (Saikhu et al., 2025).

Selain fungsi regulatif, peran pemerintah desa sebagai dinamisator juga menunjukkan berbagai keterbatasan. Pemerintah desa yang diharapkan menjadi penggerak dalam proses pemberdayaan masyarakat masih kurang aktif dalam melakukan pendekatan langsung kepada kelompok tani (Lio, 2022). Minimnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan teknis menyebabkan lemahnya transfer pengetahuan dan inovasi kepada petani (Syukriah et al., 2025). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian secara produktif dan berkelanjutan. Bahkan, ketika kegiatan pelatihan yang seharusnya menjadi instrumen utama pemberdayaan belum dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga tidak mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat tani.

Permasalahan pemberdayaan semakin kompleks ketika fungsi pemerintah desa sebagai fasilitator belum mampu memenuhi kebutuhan dasar petani. Keterbatasan sarana produksi seperti pupuk, bibit unggul, dan alat pertanian menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas (Rojia et al., 2026). Distribusi bantuan yang tidak proporsional serta kelangkaan pupuk pada musim tanam menunjukkan lemahnya manajemen sumber daya dalam mendukung kegiatan pertanian. Selain itu, kurangnya keterlibatan pemerintah dalam melakukan kunjungan lapangan secara terjadwal menyebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi petani tidak teridentifikasi utuh (Romadhona et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa fungsi fasilitasi sangat penting dalam mendukung pemberdayaan kelompok tani

Kelemahan peran pemerintah desa juga diperkuat oleh belum optimalnya kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai agen dalam pemberdayaan masyarakat (Kusmana & Garis, 2019). PPL yang seharusnya memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada petani masih menghadapi keterbatasan dalam intensitas dan kualitas layanan. Lemahnya sinergi antara pemerintah desa dan penyuluh pertanian menyebabkan proses pemberdayaan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan (Nusantara et al., 2026). Akibatnya, kualitas sumber daya manusia petani cenderung stagnan dan belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara signifikan.

Kesenjangan antara harapan normatif dan realitas empiris tersebut secara nyata terlihat di Desa Botugolu, Kabupaten Buol. Berdasarkan hasil observasi awal, peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani belum berjalan secara optimal, baik sebagai regulator, dinamisator, maupun fasilitator. Minimnya sosialisasi kebijakan, rendahnya intensitas pendampingan, terbatasnya pelatihan, serta kurangnya penyediaan sarana produksi menjadi indikator utama lemahnya proses pemberdayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok tani belum mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakefektifan pemberdayaan kelompok tani berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan struktural, seperti rendahnya produktivitas, terbatasnya akses terhadap sumber daya, serta lemahnya kapasitas kelembagaan

petani. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pembangunan pertanian di tingkat desa akan mengalami stagnasi dan sulit mencapai tujuan kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang utuh untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini membahas (1) peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu Kabupaten Buol, serta (2) kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu Kabupaten Buol. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan model pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai realitas peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu, Kabupaten Buol. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial secara kontekstual, khususnya terkait dinamika peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat (Sugiyono, 2016). Prosedur penelitian kualitatif deskriptif dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perumusan masalah, kajian pustaka, penyusunan desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi hasil penelitian. Prosedur tersebut berfungsi sebagai pedoman metodologis agar penelitian berjalan terarah, menjaga konsistensi proses, serta menjamin validitas dan kredibilitas temuan (Arikunto, 2013). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Botugolu, Kabupaten Buol sebagai lokasi penelitian yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan adanya permasalahan empiris terkait pemberdayaan kelompok tani. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang secara langsung melakukan pengumpulan data melalui interaksi dengan subjek penelitian di lapangan. Subjek penelitian terdiri dari pemerintah desa dan kelompok tani, dengan informan yang meliputi Kepala Desa, perangkat desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), ketua kelompok tani, serta anggota kelompok tani. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansi pengetahuan dan pengalaman terhadap fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara dan observasi untuk menjamin keaslian serta kedalaman informasi. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen resmi desa, laporan kegiatan pemberdayaan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penguat analisis terhadap temuan di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pemberdayaan kelompok tani dan keterlibatan pemerintah desa. Wawancara

dilakukan secara semi-terstruktur guna menggali informasi secara mendalam terkait peran pemerintah desa serta kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa arsip, laporan, serta bukti tertulis lainnya. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi yang berkelanjutan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Botugolu Kabupaten Buol

Peran Fasilitator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu telah dijalankan melalui penyediaan sarana prasarana pertanian, pengalokasian anggaran, serta mekanisme penyaluran bantuan berbasis kebutuhan kelompok tani. Data lapangan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua kelompok tani, serta masyarakat tani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Botugolu (AT), diketahui bahwa pada tahun 2026 pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp130.000.000 untuk program ketahanan pangan. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani melalui mekanisme pengajuan proposal oleh kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya memfasilitasi kebutuhan petani dengan pendekatan partisipatif.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Desa (ZT) menyampaikan bahwa bentuk fasilitas yang diberikan meliputi pembangunan jalan usaha tani, irigasi, jembatan, penyediaan bibit, pupuk, serta alat mesin pertanian seperti mesin rontok. Data observasi menunjukkan bahwa setiap petani menerima bantuan bibit berkisar 5-7 kg serta pupuk sekitar 3 karung per orang.

Namun hasil wawancara dengan masyarakat tani (SU) mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan, terutama bagi petani yang memiliki lahan luas. Ketidakseimbangan antara luas lahan dan jumlah bantuan menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi produksi pertanian.

Respon masyarakat terhadap bantuan yang diberikan cenderung positif. Petani merasa terbantu karena bantuan diberikan secara gratis tanpa biaya. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam pelaksanaan fungsi fasilitator, antara lain regulasi pengadaan pupuk bersubsidi yang mensyaratkan administrasi tertentu serta keterbatasan anggaran desa. Selain itu, kondisi infrastruktur seperti jalan usaha tani yang belum memadai turut mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan.

Tabel 1 : Jenis Bantuan Pemerintah Desa Botugolu Kabupaten Buol kepada Kelompok Tani

Jenis Bantuan	Jumlah/Deskripsi
Bibit	5-7 kg per petani
Pupuk	±3 karung per petani
Alat pertanian	Mesin rontok
Infrastruktur	Jalan usaha tani, irigasi

Sumber data : hasil penelitian

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran sebagai fasilitator, namun masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan petani secara optimal.

Pemberdayaan kelompok tani pada dasarnya berorientasi pada penyediaan akses sumber daya, sarana produksi, dan dukungan struktural guna meningkatkan kapasitas petani (Tan et al., 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Botugolu telah menjalankan fungsi tersebut melalui pengalokasian anggaran, penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, serta pembangunan infrastruktur. Mekanisme pengajuan proposal oleh kelompok tani juga mencerminkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan program.

Namun demikian, secara substantif peran fasilitator belum sepenuhnya optimal. Ketidaksiharian antara jumlah bantuan dengan luas lahan menunjukkan bahwa perencanaan belum berbasis kebutuhan yang menyeluruh. Selain itu, keterbatasan anggaran desa dan kondisi infrastruktur yang belum memadai turut menghambat efektivitas distribusi bantuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pola fasilitasi masih bersifat distributif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian petani (Sari & Firdaus, 2025).

Peran Dinamisator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai dinamisator diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan kepada kelompok tani. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan masyarakat tani.

Kepala Desa Botugolu (AT) menyampaikan bahwa dalam pemberian bantuan dan pelaksanaan program, pemerintah desa melakukan verifikasi data secara ketat untuk memastikan ketepatan sasaran. Sementara itu, Sekretaris Desa (ZT) menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilakukan melalui pertemuan kelompok tani, yang melibatkan penyuluh pertanian dalam memberikan bimbingan teknis seperti cara menanam, pemupukan, dan penggunaan alat modern.

Hasil wawancara dengan PPL (S) menunjukkan bahwa tugas penyuluh mencakup pendampingan wilayah binaan, penyuluhan teknis, pembinaan kelompok tani, serta monitoring dan pelaporan. Target utama kegiatan ini adalah peningkatan produktivitas pertanian yang berdampak pada kesejahteraan petani.

Dari sisi masyarakat, petani (SU) mengakui telah menerima pelatihan dan penyuluhan yang dinilai cukup membantu dalam meningkatkan pengetahuan

pertanian. Selain itu, observasi menunjukkan bahwa pemerintah desa juga melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk memantau kondisi petani.

Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan peran dinamisator, yaitu rendahnya partisipasi aktif sebagian petani. Banyak petani masih menggunakan pola tanam tradisional dan kurang mengikuti arahan teknis. Selain itu, beberapa kelompok tani belum dikelola secara optimal, sehingga menghambat efektivitas program pemberdayaan. Meskipun peran dinamisator telah berjalan cukup aktif, masih diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi petani agar program pemberdayaan lebih efektif.

Peran dinamisator menempatkan pemerintah desa sebagai penggerak perubahan melalui proses sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani (Ramli et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Botugolu telah menjalankan fungsi ini melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan kelompok tani, serta keterlibatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam memberikan bimbingan teknis. Upaya verifikasi data dan pendampingan lapangan juga mencerminkan adanya penguatan proses implementasi program.

Namun demikian, efektivitas peran dinamisator masih terbatas. Rendahnya partisipasi petani serta masih dominannya pola pertanian tradisional menunjukkan bahwa proses transfer pengetahuan belum sepenuhnya berhasil (Oktaviani et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan dalam internalisasi inovasi, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kebiasaan, dan tingkat pemahaman petani. Selain itu, kelembagaan kelompok tani yang belum optimal turut menghambat keberhasilan program pemberdayaan (Jahra et al., 2025).

Peran Regulator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa serta sosialisasi kebijakan pertanian yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Desa (AT) menjelaskan bahwa setelah anggaran disahkan, pemerintah desa mengundang kelompok tani untuk membahas program dan memastikan bantuan tepat sasaran. Sekretaris Desa (ZT) menambahkan bahwa penyusunan kebijakan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan petani dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Namun demikian, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan penuh dalam membuat regulasi, karena sebagian besar aturan berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah desa hanya berperan dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai kondisi lokal.

Hasil wawancara dengan masyarakat tani menunjukkan bahwa sebagian petani kurang memahami regulasi yang ada. Mereka cenderung hanya mengikuti program tanpa mengetahui dasar kebijakan. Selain itu, meskipun aspirasi petani didengar, proses realisasi bantuan dinilai masih lambat, terutama dalam penyediaan pupuk dan bibit.

Meskipun demikian, persepsi petani terhadap kebijakan pemerintah desa cenderung positif. Petani menilai bahwa pemerintah desa telah membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa peran regulator telah berjalan, namun masih perlu penguatan dalam aspek sosialisasi kebijakan dan percepatan implementasi program.

Peran regulator menempatkan pemerintah desa sebagai aktor yang mengatur, mengarahkan, dan mengimplementasikan kebijakan guna memastikan program pemberdayaan berjalan efektif dan tepat sasaran (Prasasti & Ma'ruf, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Botugolu telah menjalankan fungsi ini melalui mekanisme musyawarah desa, identifikasi kebutuhan petani, serta sosialisasi kebijakan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Proses ini mencerminkan adanya praktik tata kelola yang partisipatif dalam penyusunan program.

Namun demikian, secara struktural pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan karena sebagian besar kebijakan bersifat top down. Kondisi ini menyebabkan pemerintah desa lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan daripada pembuat kebijakan (Khabib et al., 2024). Implikasinya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan riil petani di tingkat lokal.

Selain itu, rendahnya pemahaman petani terhadap regulasi serta lambatnya realisasi bantuan menunjukkan bahwa aspek implementasi kebijakan belum berjalan optimal (Wahyuni et al., 2024). Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses sosialisasi dan koordinasi kebijakan. Meskipun demikian, persepsi petani terhadap peran pemerintah desa tetap positif karena dinilai telah membantu memenuhi kebutuhan mereka.

Kendala-Kendala Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Botugolu Kabupaten Buol

Kendala Internal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala internal pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu meliputi keterbatasan anggaran, kondisi infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, serta kendala koordinasi antar lembaga. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta observasi lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Botugolu (AT), diketahui bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp130.000.000 masih tergolong minim jika dibandingkan dengan kebutuhan kelompok tani yang cukup besar. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan seperti pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sarana produksi pertanian.

Selain itu, hasil observasi lapangan menunjukkan adanya kerusakan infrastruktur jalan usaha tani pada dua titik lokasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap peningkatan biaya produksi petani, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan mobilitas menuju lahan. Sekitar 115 petani mengalami kenaikan biaya operasional, khususnya pada komoditas jagung.

Kendala internal lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam menyusun program berbasis kebutuhan, melakukan pendampingan teknis, serta evaluasi program secara sistematis.

Dalam aspek koordinasi, Kepala Desa (AT) mengungkapkan bahwa masih terdapat miskomunikasi antar pihak dalam pelaksanaan program, meskipun tidak sampai menimbulkan konflik yang serius. Sementara itu, Sekretaris Desa (ZT) menyatakan bahwa secara umum koordinasi berjalan baik, namun tetap diperlukan peningkatan dalam sinkronisasi data dan pelaksanaan program.

Tabel 2. Kendala Internal Pemerintah Desa Botugolu Kabupaten Buol

Jenis Kendala	Deskripsi
Anggaran	Terbatas (Rp130.000.000 belum mencukupi kebutuhan)
Infrastruktur	Jalan usaha tani rusak di 2 titik
SDM Aparatur	Keterbatasan kompetensi bidang pertanian
Koordinasi	Terjadi miskomunikasi antar pihak
Regulasi	Perubahan kebijakan membutuhkan penyesuaian

Sumber data : hasil penelitian

Dapat disimpulkan bahwa kendala internal pemerintah desa bersifat struktural dan teknis, yang secara langsung memengaruhi efektivitas program pemberdayaan kelompok tani.

Kendala internal dalam pemberdayaan kelompok tani berkaitan dengan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, merancang program, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan (*sitasi*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pemberdayaan.

Keterbatasan anggaran desa menunjukkan adanya rendahnya kapasitas fiskal dalam mendukung program pemberdayaan secara optimal. Anggaran sebesar Rp130.000.000 belum mampu memenuhi kebutuhan kelompok tani secara menyeluruh, sehingga program yang dijalankan cenderung terbatas dan tidak berkelanjutan. Selain itu, kerusakan infrastruktur jalan usaha tani berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi dan distribusi hasil pertanian, yang dalam perspektif pembangunan pedesaan merupakan hambatan struktural terhadap peningkatan produktivitas.

Kendala lain terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, yang memengaruhi kemampuan dalam menyusun program berbasis kebutuhan serta melakukan pendampingan dan evaluasi secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pemberdayaan tidak hanya terletak pada ketersediaan program, tetapi juga pada kualitas pelaksana program (Abdillah et al., 2025).

Dalam aspek koordinasi, adanya miskomunikasi antar pihak menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan belum berjalan optimal. Dalam teori tata kelola pemerintahan, koordinasi yang lemah dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan implementasi program (Mana et al., 2025). Meskipun secara umum koordinasi dinilai berjalan baik, kebutuhan akan sinkronisasi data dan komunikasi tetap menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program.

Kendala Eksternal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala eksternal dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu meliputi rendahnya partisipasi dan pemahaman petani, keterbatasan ekonomi, kemampuan administratif yang rendah, serta ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat tani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Hasil wawancara dengan penyuluh pertanian lapangan (S) menunjukkan bahwa dalam kegiatan penyuluhan masih terdapat petani yang sulit memahami materi yang disampaikan. Perbedaan tingkat pendidikan dan kemampuan menerima informasi menjadi hambatan dalam proses transfer teknologi pertanian.

Selain itu, hasil wawancara dengan masyarakat tani (SU dan PS) menunjukkan bahwa petani mengalami kesulitan dalam aspek administratif, khususnya dalam penyusunan proposal bantuan. Petani mengaku belum terbiasa dengan proses tersebut sehingga membutuhkan pendampingan dari pemerintah desa.

Kendala eksternal lainnya adalah keterbatasan ekonomi petani yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Petani menyatakan bahwa bantuan yang diberikan, seperti bibit jagung, belum sebanding dengan luas lahan yang dimiliki. Selain itu, keterlambatan dalam penyaluran bantuan juga memengaruhi proses produksi pertanian.

Dari sisi partisipasi, tidak semua petani aktif dalam kegiatan kelompok tani. Sebagian masih menggunakan pola pertanian tradisional dan kurang mengikuti arahan teknis dari penyuluh, sehingga program pemberdayaan belum berjalan optimal.

Tabel 3. Kendala Eksternal Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Botugolu Kabupaten Buol

Jenis Kendala	Deskripsi
Pemahaman Petani	Sebagian petani sulit memahami materi saat penyuluhan
Partisipasi	Tidak semua petani aktif dalam kelompok
Ekonomi	Ketergantungan pada bantuan pemerintah
Administrasi	Kesulitan dalam pembuatan proposal
Bantuan	Tidak sesuai dengan luas lahan
Waktu	Penyaluran bantuan sering terlambat

Sumber data : hasil penelitian

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala eksternal lebih bersifat sosial dan kultural, yang berkaitan dengan kapasitas petani serta kondisi ekonomi masyarakat.

Kendala eksternal dalam pemberdayaan kelompok tani berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas individu petani yang memengaruhi keberhasilan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan partisipasi petani, keterbatasan ekonomi, serta lemahnya kemampuan administratif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pemberdayaan.

Rendahnya pemahaman petani terhadap materi penyuluhan menunjukkan bahwa proses transfer pengetahuan belum berjalan optimal. Perbedaan tingkat pendidikan dan kemampuan menerima informasi menyebabkan sebagian petani masih mempertahankan pola pertanian tradisional (Gusti et al., 2021). Dalam perspektif difusi inovasi, kondisi ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi pertanian terhambat oleh faktor kognitif dan sosial (Aboagye-darko & Mkhize, 2025).

Selain itu, keterbatasan kemampuan administratif petani dalam menyusun proposal bantuan mengindikasikan adanya rendahnya literasi kelembagaan. Kemampuan administratif merupakan bagian penting dalam mengakses program dan sumber daya, sehingga kelemahan pada aspek ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah desa (Kamuli et al., 2021).

Keterbatasan ekonomi petani juga menjadi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Ketergantungan terhadap bantuan menunjukkan bahwa petani belum memiliki kemandirian ekonomi yang kuat. Ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan lahan serta keterlambatan distribusi bantuan semakin memperburuk kondisi produksi pertanian.

Dari sisi partisipasi, rendahnya keterlibatan petani dalam kelompok tani menunjukkan bahwa kelembagaan lokal belum berfungsi secara optimal. Partisipasi merupakan indikator utama keberhasilan program (Tan et al., 2026). Minimnya partisipasi mengindikasikan bahwa program belum mampu membangun kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Botugolu telah dijalankan melalui fungsi fasilitator, dinamisator, dan regulator, namun belum sepenuhnya mencapai efektivitas substantif. Secara umum, pemerintah desa telah menyediakan dukungan berupa bantuan sarana produksi, pelatihan, pendampingan, serta mekanisme musyawarah dalam penyusunan program. Meskipun demikian, implementasi ketiga peran tersebut masih bersifat parsial, yang ditandai dengan belum optimalnya perencanaan berbasis kebutuhan, rendahnya partisipasi petani, serta keterbatasan dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan masih berada pada tahap distributif dan belum

sepenuhnya mampu mendorong kemandirian petani secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani bersifat multidimensional, meliputi faktor internal seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, kapasitas aparatur, dan koordinasi, serta faktor eksternal seperti rendahnya pemahaman, partisipasi, kemampuan administratif, dan kondisi ekonomi petani. Interaksi antara kendala internal dan eksternal tersebut menyebabkan program pemberdayaan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pemberdayaan yang lebih integratif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, penguatan partisipasi dan literasi petani, serta perbaikan sistem perencanaan dan implementasi program berbasis kebutuhan lokal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model pemberdayaan berbasis kearifan lokal dan pendekatan partisipatif yang lebih adaptif guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan kelompok tani di tingkat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, A. F., Endah, K., & Garis, R. R. (2025). Pemberdayaan Kelompok Tani Rindik Indah Melalui Program Tani Hybrida Di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 771-782.
- Aboagye-Darko, D., & Mkhize, P. (2025). Heliyon Unearthing The Determinants Of Digital Innovation Adoption In The Agricultural Sector : The Role Of Food Security Awareness And Agricultural Experience. *Heliyon*, 11(1), E41695. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.E41695>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Pt Rineka Cipta.
- Farid, Jusriadi, Tobigo, H., Agus, M., Marsanda, & Irma, A. (2025). Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Mendukung Pencapaian Kegiatan Ekonomi Di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1), 15-24.
- Ginting, A. H. B., & R, S. H. N. (2025). Kelembagaan Petani Dalam Meningkatkan Produksi Kentang Di Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. *Sajjana: Public Administration Review*, 03(01), 1-9.
- Gusti, I. M., Gayatri, S., & Prasetyo, A. S. (2021). Pengaruh Umur , Tingkat Pendidikan Dan Lama Bertani Terhadap Pengetahuan Petani Mengenai Manfaat Dan Cara Penggunaan Kartu Tani Di Kecamatan Parakan Tha Affecting Of Farmer Ages , Level Of Education , And Farming Experience Toward The Level Of Farmer Know. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 209-221.
- Jahra, F., Raudah, S., & Baihaqi, A. (2025). Efektivitas Pemberdayaan Kelompok Tani Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Di Desa Panggung Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 762-771.
- Kamuli, S., Mozin, N., & Dotuttinggi, S. J. (2021). Pemberdayaan Perangkat Desa Dalam Penguatan Kelembagaan Desa Talaki. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 416-419.
- Khabib, M., Ma, A., Rahman, A. Z., Ananda, A., & Fauzi, I. (2024). Optimalisasi

- Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(2).
- Kusmana, E., & Garis, R. R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (Ppl) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 5(4), 460–473.
- Lio, Y. P. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(4), 388–393.
- Mana, F. A., Enala, S. H., & Wayangkau, I. H. (2025). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Optimalisasi Sektor Pendidikan. *Musamus Journal Of Public Administration*, 8(1), 44–49.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*.
- Nusantara, R., Fahri, M., & Susanti, E. (2026). Koordinasi Antara Pemerintah Desa Dan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus: Desa Fajar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3, 280–288.
- Oktaviani, N. R., Alamsyah, M. N., & Rusdin, R. B. (2025). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. *Jsip: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 01(03), 14–26.
- Pangaribuan, O., & Kurniaty, E. Y. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sidulang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba. *Jurnal Iso: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora Vol.*, 5(1), 1–13.
- Prasasti, P. F., & Ma'rif, M. F. (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(12), 598–614.
- Radjak, D. A., Ra'is, D. U., & Rohman, A. (2024). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Penerbit Forind.
- Ramli, H., Muhiddin, A., & Yusuf, M. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Jurnal Unismuh*, 5(4).
- Rojia, Ananda, I. A., & Marina. (2026). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tangaran Kecamatan Tangaran). *Cross-Border Journal Of Business Management*, 06(01), 1–15.
- Romadhona, S. N., Listiana, I., Ibnu, M., & Gitosaputro, S. (2025). Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Dalam Pemberdayaan Petani Gurem Di Kecamatan Kotabumi Utara , Kabupaten Lampung Utara The Role Of Stakeholders In Empowering Smallholder Farmers In Kotabumi. *Suluh Pembangunan: Journal Of Extension And Development*, 7(02), 148–161.
- Saikhu, M., Pujiyanto, A., Rataniawati, A. I., Salsabila, T., Bii, M. W., Muchith, S. B., Gumilang, A. S., & Azzuhri, R. M. (2025). Memahami Sikap Petani Terhadap Pertanian Berkelanjutan: Tinjauan Sistematis Tren Global. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 40594–40603.

-
- Sari, D. I., & Firdaus, M. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat: Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(8), 1-13.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Dan Pengembangan (Research And Development/R&D). *Bandung: Alfabeta*, 334.
- Suprobowati, D., & Miskan. (2025). Implementasi Model Kelembagaan Berbasis Gotong Royong Dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Policy And Maritime Review*, 4(1), 1-14.
- Syukriah, Hasfita, F., Faisal, Faisal, Bahtiar, Asmara, R., Aksa, F. N., & Jamidi. (2025). Sosialisasi Pentingnya Pelatihan Para Petani Dalam Peningkatan Potensi Ketahanan Pangan Di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal*, 4(1), 240-245.
- Tan, C. M. B., Nursalam, Seran, D. A. N., & Benyamin, R. A. (2026). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian (Studi Pada Kelompok Tani Bersaudara Desa Oelbubuk Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 5(2).
- Wahyuni, P. R., Hamzah, A., & Anwar, M. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Petani Terhadap Fluktuasi Harga Komoditas Pertanian Di Kabupaten Sumenep. *Performance : Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(2), 138-150.